

Pelatihan Penyusunan LAKIP Berperspektif Gender di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (*Training on Preparation of LAKIP with a Gender Perspective at the Government of Central Lampung District*)

Handy Mulyaningsih¹, Simon Sumanjoyo Hutagalung^{2*}, Rahayu Sulistiowati³, Eko Budi Sulistio⁴

Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3,4}

handy.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id¹, simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id^{2*},

r.sulistiowati@fisip.unila.ac.id³, eb.sulistio@fisip.unila.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 4 Maret 2023

Revisi 1 pada 3 April 2023

Revisi 2 pada 5 Mei 2023

Disetujui pada 26 Juni 2023

Abstract

Purpose: this activity aims to: (1). Optimizing the capacity of the district government apparatus group so that they have the knowledge to identify and compile development planning documents in each regional apparatus organization (OPD), (2). Increase the capacity of district government apparatus groups in identifying and compiling development planning documents in each regional apparatus organization (OPD).

Methodology: Community service activities are carried out in the form of training with a theoretical pragmatic approach and a practical pragmatic approach. In the implementation phase, the main activities carried out are the delivery of materials, training, and practice.

Results: From the results of the activity it is known that most of them gave an enthusiastic response and provided positive feedback by demonstrating their ability to compose development planning narratives with a gender perspective in the Central Lampung Regency environment.

Conclusion: This activity is able to achieve the desired goals before.

Keywords: *Development Planning, Gender Perspective, Gender Analysis*

How to Cite: Mulyaningsih, H., Hutagalung, S, S., Sulistiowati, R., Sulistio, E. B. (2023). Pelatihan Penyusunan LAKIP Berperspektif Gender di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-7.

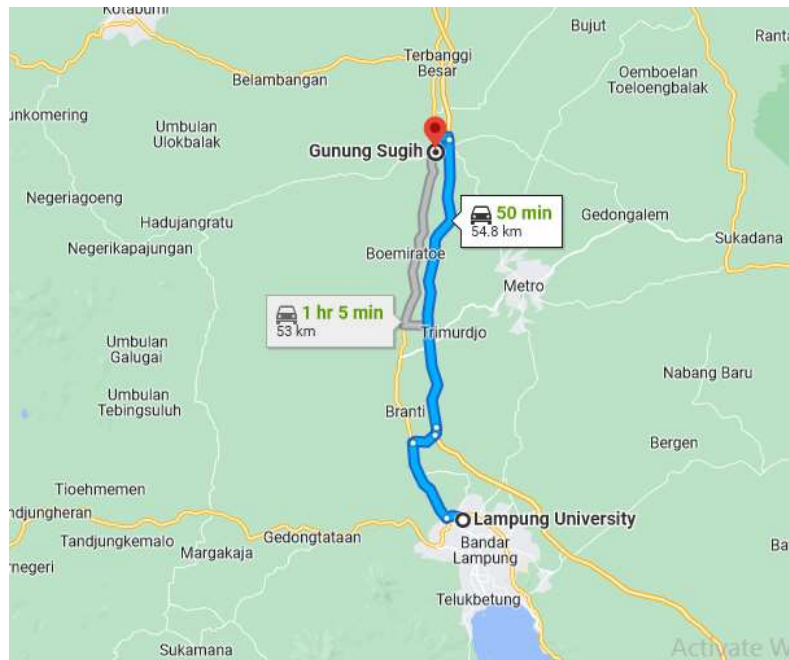
1. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan dalam peradaban yang menjunjung tinggi kesetaraan seperti sekarang adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara (Koesriwulandari, 2015). Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan (Antasari & Hadi, 2017). Secara umum dan sederhana, gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan mereka baik di tingkat masyarakat maupun negara (Hasanah & Musyafak, 2017). Kaitannya dengan pembangunan, ada tiga perspektif dalam melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Effendi & Ratnasari, 2018). Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif mutu modal manusia (*human capital*) (Riwukore, 2022), perspektif yang

menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender.

Dhewy (2017) menyimpulkan bahwa dalam RPJMN 2015-2019 perspektif gender hanya digunakan sebagai formalitas belaka belum diterapkan secara substansial. Pencomotan perspektif gender dengan mengabaikan substansinya akan menjauhkannya dari kepentingan perempuan (Dhewy, 2017). Pemahaman yang lebih baik atas keterkaitan yang kompleks dari berbagai isu yang kita hadapi hari-hari ini sangatlah penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya serta mampu merespons tantangan dan kesenjangan yang ada (Rahmawati & Hidayah, 2020). Contoh konkrit analisis gender dalam pembangunan dapat dilihat dari kajian Anita Dhewy yang berjudul *Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019*. Dhewy (2017) menyatakan bahwa meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Dhewy (2017) menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 (Dhewy, 2017). Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru (Amory, 2019).

Secara lebih rinci, Dhewy (2017) menjelaskan bagaimana perspektif gender belum menjadi bagian integral dari RPJMN 2015-2019. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan, pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, serta perubahan iklim yang belum memasukkan perspektif gender. Hal serupa juga ditemui pada arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang khususnya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (Malau, 2014). RPJMN 2015-2019 telah mengenali dan memasukkan kelompok marginal dalam arah dan strateginya. Akan tetapi aspek gender tidak menjadi pertimbangan. Sehingga strategi dan sasaran yang hendak dicapai RPJMN 2015-2019 masih netral gender. Demikian juga yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan temuan yang menunjukkan jika seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengadopsi perencanaan pembangunan yang berperspektif gender. Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah serta laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) belum disusun dengan menggunakan prinsip tersebut. Analisis situasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, mengidentifikasi beberapa permasalahan mitra sebagai berikut: (a). Belum semua aparatur yang berwenang di masing-masing OPD memahami penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan secara optimal, dan (b). Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berperspektif gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi terhadap kondisi tersebut melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Berikut adalah gambaran lokasi kegiatan ini:



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dan Jarak dari Kampus

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya disusun rumusan masalah untuk dipecahkan melalui pengabdian ini yaitu diperlukan intervensi agar kelompok aparatur pemerintah kabupaten Lampung Tengah dapat lebih berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah plastik, dengan tujuan sebagai berikut: (1). Mengoptimalkan kapasitas kelompok aparatur pemerintah kabupaten agar dapat memiliki pengetahuan mengidentifikasi dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), (2). Meningkatkan kapasitas kelompok aparatur pemerintah kabupaten dalam mengidentifikasi dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

2. Metodologi

Metode pengabdian yaitu berupa pelatihan dengan pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis. Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah penyampaian materi, pelatihan, dan praktik terhadap proses identifikasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berperspektif gender, sebagai berikut: (1). Ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab, dan penyampaian studi kasus, (2). Demonstrasi, selain ceramah, metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai bentuk bentuk identifikasi pernyataan atau rumusan dokumen pembangunan yang berperspektif gender, (3). Praktik terpandu, metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktekkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan (Bangsawan et al., 2021). Pada kegiatan praktik ini sekaligus dapat diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya (Yuliansyah, Dewi, & Amelia, 2020).

Langkah kerja dalam kegiatan pengabdian ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian (Santati, Saftiana, Mavillinda, & Ghasarma, 2022). Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan: (1) koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pimpinan OPD tempat kegiatan pengabdian dilaksanakan, (2) koordinasi dengan khalayak sasaran, (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan dan media yang diperlukan

dalam pelaksanaan. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah aparatur pengelola dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan yang mewakili beberapa OPD di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah yang hadir sebanyak 40 orang. Sementara itu, dalam hal evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta/sasaran kegiatan, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.

3. Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, lalu dilanjutkan oleh sambutan dari ibu Handy Mulyaningsih sebagai kordinator dari tim kegiatan pengabdian. Pada dasarnya pihak pemerintah kabupaten Lampung Tengah menyambut baik kehadiran tim yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi pada aparatur pengelola dokumen pembangunan di masing-masing OPD. Hal ini juga sejalan dengan permintaan dari Bapak Bupati Lampung Tengah agar seluruh OPD mulai mengaplikasikan perencanaan dan pelaporan kinerja yang berperspektif gender. Berikut susunan materi yang kemudian secara bergantian disajikan oleh tim pengabdian pada masyarakat.

Tabel 1. Distribusi Materi dan Narasumber Pelatihan

No	Materi	Narasumber
1.	Gender Dalam Pembangunan	Handy Mulyaningsih
2.	Perencanaan dan Penganggaran Berperspektif Gender	Rahayu Sulistiowati
3.	Model Gender Analysis Pathway	Eko Budi Sulistio
4.	Integrasi Gender dalam perencanaan dan evaluasi	Simon Sumanjoyo Hutagalung

Pada materi pertama, disajikan tentang perspektif mutu modal manusia (*human capital*) yang menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi (Fadliyanti, Diswandi, & Afifi, 2022). Tanpa keterlibatan itu sulit bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan (Effendi & Ratnasari, 2018). Perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal menekankan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga selama ini terjadi inefisiensi dalam pembangunan (Arbiyanti, 2020). Atas dasar inilah kaum perempuan perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke negara berkembang. Hal tersebut membuka peluang keterlibatan kaum perempuan di pasar kerja untuk mendapatkan upah. Dengan demikian mereka dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi (Effendi & Ratnasari, 2018).

Pada materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Rahayu Sulistiowati, disampaikan jika perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan yang mengejawantah dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat (Kertati, 2019). Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif *human capital* tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Effendi & Ratnasari, 2018).

Untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat transformatif dan mengikutsertakan serta memberi manfaat bagi semua pihak, maka seksualitas, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak asasi

manusia perlu dijabarkan dalam dokumen untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan dan pendanaan (Elisa, 2022). Tidak cukup hanya memasukkan kata-kata seperti inklusivitas dan berkeadilan ketika praktik yang dijalankan bertentangan dengan yang dikatakan atau yang tertulis (Susanto & Marnisah, 2021). Kesungguhan atas komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, kesetaraan dan keadilan bagi semua mensyaratkan masuknya hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) sebagai bagian integral dari semua diskursus dan perencanaan terkait pembangunan (Dhewy, 2017). Pada materi ketiga disampaikan tentang *gender analysis pathway* oleh Bapak Eko Budi Sulistio. Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan (Chusna, Karismalia, Putri, & Astuti, 2022). Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Mandasari, 2022). Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP.

Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat merumuskan kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya. Terakhir, materi tentang Integrasi Gender dalam perencanaan dan evaluasi yang disampaikan Bapak Simon Sumanjyo Hutagalung mengulas aspek teknis dari Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Muhartono, 2020). Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber dan peserta pelatihan

Kegiatan yang terlaksana selama 8 jam tersebut telah menyampaikan materi-materi yang dianggap penting dan menambah pengetahuan para peserta. Dalam sesi diskusi, diketahui jika selama ini belum ada upaya untuk menjelaskan secara lebih terperinci perihal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang berperspektif gender. Peserta yang lain menanggapi juga kegiatan ini secara positif yang dianggap mampu memberi petunjuk-petunjuk baru dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Secara menyeluruh, dapat dihimpun beberapa respon peserta terkait materi yang disampaikan dalam kegiatan ini, hal ini dapat dicermati dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Identifikasi Persoalan/Hambatan dan Tantangan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Gender

No	Persoalan/Hambatan/ Tantangan	Kategorisasi	Umpan Balik
1.	Pendalaman pengetahuan tentang cara mengintegrasikan isu gender dalam dokumen Lakip	Pengetahuan	Menjelaskan lebih detail dengan contoh dalam integrasi isu gender dalam dokumen Lakip
2.	Identifikasi indikator dalam uraian penyusunan dokumen Lakip	Keterampilan	Perlu kehati-hatian dalam mengidentifikasi, kaitkan dengan tujuan program/kegiatan
3.	Sinkronisasi uraian dokumen Lakip dan Renja OPD	Pengetahuan dan Keterampilan	Perlu kerjasama tim dan kesamaan pengetahuan dalam menyusun dokumen tersebut
4.	Kemampuan penyelesaian dokumen Lakip dalam waktu tersisa	Keterampilan	Disarankan ada media saling sharing dan dukung sehingga pengetahuan merata dan keterampilan mampu dikuasai menyeluruh.

Sumber: Diskusi, 2023

Dari tanggapan peserta tersebut dapat terlihat jika kegiatan ini telah mampu memberi tambahan pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga dapat dikatakan jika kegiatan ini telah mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengelola dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang menjadi peserta kegiatan ini. Sebagian besar memberikan respon yang antusias dan memberikan feedback positif dengan upaya menunjukkan kemampuan mereka dalam menyusun narasi perencanaan pembangunan yang berperspektif gender di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun, sebagian peserta lainnya berniat untuk membentuk forum diskusi antar pengelola dokumen perencanaan sehingga akan ada proses saling belajar sesama mereka. Pada akhir kegiatan, pihak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan kesan positif atas kegiatan ini dan berharap agar dimasa mendatang ada kegiatan yang sifatnya lebih mendalam dan intes kepada para aparatur pemerintah daerah lainnya.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa pelatihan dengan pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis. Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah penyampaian materi, pelatihan, dan praktik terhadap proses identifikasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berperspektif gender. Dari hasil penyelenggaraan kegiatan, dapat dikatakan jika kegiatan ini telah mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengelola dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang menjadi peserta kegiatan ini. Sebagian besar memberikan respon yang antusias dan memberikan feedback positif dengan upaya menunjukkan kemampuan mereka dalam menyusun narasi perencanaan pembangunan yang berperspektif gender di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, tim pelaksana kegiatan dan seluruh pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 132–161.
- Arbiyanti, H. (2020). Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan Negara-Negara Di Eropa (STUDI KASUS: Finlandia, Inggris, Prancis, Dan Jerman). *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 2(2).
- Bangsawan, S., Ms, M., Ahadiat, A., Ribhan, R., Kesumah, F. S. D., & Febrian, A. (2021). Pengembangan Desa Wisata melalui Pelatihan dan Pembinaan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i2.615>
- Chusna, I. N., Karismalia, A. M., Putri, M. S., & Astuti, E. Z. L. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 5(2), 141–147.
- Dhewy, A. (2017). Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019. *Jurnal Perempuan*, 22(1), 55–64.
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). *Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*.
- Elisa, I. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Analisis Regresi Data Panel. *Journal of Mathematics UNP*, 7(2), 8–14.
- Fadliyanti, L., Diswandi, D., & Afifi, M. (2022). Human Capital dan Kinerja Usaha melalui Women Entrepreneur's Capability pada Industri Pariwisata. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(2), 107–123.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409–432.
- Kertati, I. (2019). EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SEMARANG. *Jurnal Riptek*, 13(1), 57–64.
- Koesriwulandari, K. (2015). Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 15(2).
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131.
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117–134. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175>
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 110–129.
- Riwukore, J. R. (2022). Pelatihan: Evaluasi dan Rekonstruksi Kinerja ASN Pemerintah Kota Kupang Berbasis Sumber Daya Manusia. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 79–100. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i2.1472>
- Santati, P., Saftiana, Y., Mavillinda, H. F., & Ghasarma, R. (2022). Peningkatan Literasi Teknologi Informasi Bagi Perangkat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 175–188. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.1037>
- Susanto, Y., & Marnisah, L. (2021). Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi bagi Pengawas Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 101–108. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i2.619>
- Yuliansyah, Y., Dewi, F. G., & Amelia, Y. (2020). Pelatihan Standar Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangan bagi staf keuangan pondok pesantren. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11–17. <https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.57>